

INTISARI

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 51 Tahun 2016, Kabupaten Kepulauan Sangihe ditetapkan menjadi daerah Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) dengan tujuan untuk membangun dan mengintegrasikan proses bisnis kelautan dan perikanan berbasis masyarakat melalui optimalisasi pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan di pulau-pulau kecil atau kawasan perbatasan secara berkelanjutan. Dalam waktu kurang lebih dua tahun, implementasi program SKPT di Kab. Kep. Sangihe dianggap sudah berhasil sementara fakta dilapangan menunjukkan hal yang kontradiktif. Salah satu bentuk belum terintegrasinya proses bisnis pasca tangkap, maka sampai saat ini nelayan di Kab. Kep. Sangihe hanya menikmati harga jual yang rendah. Berangkat dari hal ini, penulis tertarik untuk mengkaji implementasi program SKPT di Kab. Kep. Sangihe.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi program SKPT dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program SKPT di Kab. Kep. Sangihe. Metode penelitian yang dilakukan adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi selama 3 minggu. Penentuan 13 orang informan dilakukan secara purposive. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana berhasil dilakukan. Sedangkan pengembangan kelembagaan, pengembangan bisnis kelautan dan perikanan, dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan tidak berjalan dengan baik. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program SKPT adalah isi kebijakan dan hubungan antar organisasi.

Kata Kunci: Implementasi, Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT), Integrasi, Harga jual

ABSTRACT

According to *Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 51 Tahun 2016*, Sangihe Regency was established as an Integrated Marine and Fisheries Center with the aim of building and integrating community-based marine and fisheries business processes through the optimization of the utilization of marine and fisheries resources in small islands or border areas in a sustainable manner. In less than two years, the implementation of the Integrated Marine and Fisheries Center Program in Sangihe Regency is considered successful while the facts in the field show contradictory things. One of the post-capture business processes that have not been integrated, so far fishermen in Sangihe Regency only enjoys a low sale price. Departing from this, the authors are interested in reviewing the implementation of the SKPT program in Sangihe Regency.

This study aims to describe the implementation of the SKPT program and identify the factors that influence the implementation of the Integrated Marine and Fisheries Center program in Sangihe Regency. The research method is descriptive qualitative. Data collection techniques were carried out through interviews, observation, and documentation for 3 weeks. Determination of 13 informants was carried out purposively. The results of the research show that the development and development of facilities and infrastructure have been successfully carried out. Whereas institutional development, the development of the marine and fisheries business, and sustainable management of marine and fisheries resources are not going well. The factors that influence the implementation of the SKPT program are the contents of policies and relations between organizations.

Keywords: Implementation, Integrated Marine and Fisheries Centers (SKPT), Integration, Sale prices